

## ANALISIS POTENSI INVESTASI DI KOTA SEMARANG

Hardiwinoto, Andwiani Sinarasri (Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang)

Akhmad Fathurrohman (Fakultas MIPA Universitas Muhammadiyah Semarang)

### ABSTRACT

The research aims to identify potential investment in the city of Semarang. The method used to survey about baseline economic activity and identification of potential investment to the stakeholders with the investment both private and government in the city of Semarang. The method of analysis used is survey and descriptive statistic. The analytical methods to determine the potential investment in the city of Semarang. The results of the study are known potential investment of Semarang City accordance with the location, type and sources of investment financing.

**Keywords:** *potencial investment, baseline economic activity*

### 1. Pendahuluan

#### 1.1. Latar Belakang

Salah satu pemicu pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Pertumbuhan investasi akan meningkatkan kapasitas produksi, sehingga meningkatkan tersedianya barang dan jasa. Sejak tahun 2001, pemerintah daerah mempunyai kewenangan mengatur pemerintahan dan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki. Pemerintah daerah berpacu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif. Pemerintah daerah dalam menjalankan dalam menarik para investor baru, memiliki kendala-kendala, antara lain dalam perencanaan investasi.

Melalui perencanaan investasi yang baik, akan mampu meningkatkan Kota Semarang menjadi pusat kegiatan investasi. Setelah diketahui potensi investasi maka dapat dikembangkan investasi berikutnya sehingga dapat mendorong investasi lain berkembang. Investasi selalu terkait dengan kegiatan transaksi dan distribusi barang dan jasa. Konsekuensi untuk dapat menarik investor melakukan investasi pemerintah perlu memiliki data tentang potensi investasi.

Perencanaan dan pelaksanaan investasi perlu didasari oleh kajian potensi investasi yang memadai. Penelitian ini akan mengeksplorasi potensi investasi di Kota Semarang. Dengan tersedianya data potensi investasi, maka membantu baik bagi pemerintah maupun swasta dalam menentukan jenis investasi yang akan ditanamkan. Dengan pertumbuhan investasi maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

#### 1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah melakukan identifikasi potensi investasi di Kota Semarang.

#### 1.3. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian penelitian adalah membantu pemerintah dalam penyediaan data potensi investasi untuk dilakukan investasi pemerintah maupun swasta.

### 2. Kajian Teori

#### 2.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Faktor faktor penentu pertumbuhan ekonomi menurut Kznets (1969) yaitu:

1. Kenaikan pendapatan perkapita riil.
2. Distribusi angkatan kerja menurut sektor kegiatan produksi yang merata.

Kuncoro (2003) menyatakan bahwa pendekatan pembangunan dimaknai sebagai peningkatan PDRB suatu provinsi, kabupaten, atau kota. Umumnya PDRB dihitung berdasarkan dua pendekatan, yaitu berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. PDRB menunjukkan jumlah seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh penduduk dalam periode tertentu.

Teori pusat pertumbuhan (*The Growth Pole Theory*) dianggap sesuai dalam pengembangan investasi kota, wilayah, kawasan atau tempat dimana digunakan untuk konsentrasi aktivitas penduduk. Kota sebagai pusat perdagangan, pusat industri, pusat pertumbuhan, simpul distribusi, pusat permukiman, atau daerah modal. Daerah di luar pusat konsentrasi disebut sebagai daerah atau wilayah *hinterland*, daerah pertanian, atau daerah pedesaan (Tarigan, 2004).

Di daerah terkonsentrasi akan tercipta skala ekonomis (*economies of scale*) dan *economies of agglomeration (economies of localization)*. Dikatakan *economies of scale*, karena akan spesialisasi, sehingga produksi menjadi lebih besar dan biaya lebih efisien. *Economies of agglomeration* adalah keuntungan karena di tempat tersebut terdapat berbagai keperluan dan fasilitas yang dapat digunakan untuk memperlancar kegiatan perusahaan, yaitu jasa perbankan, asuransi, perbengkelan, perusahaan listrik, perusahaan air bersih, tempat-tempat pelatihan keterampilan, media untuk mengiklankan produk, dan lain sebagainya.

Tarigan (2004) menjelaskan bahwa terjadi interaksi antara kota dengan di sekitarnya, yaitu:

1. Hubungan generatif: yaitu hubungan yang saling menguntungkan atau saling mengembangkan antara kota dengan daerah sekitarnya.
2. Hubungan parasitif: yaitu hubungan antara kota dan daerah sekitarnya tidak banyak membantu, bahkan bisa melemahkan pertumbuhan daerah sekitarnya.
3. *Enclave*: yaitu kota seakan-akan terpisah sama sekali dengan daerah sekitarnya.

Daerah pusat pertumbuhan memiliki empat ciri (Tarigan, 2004), yaitu:

1. Adanya hubungan antara berbagai macam kegiatan yang memiliki nilai ekonomi.
2. Ada efek pengganda (*multiplier effect*).
3. Adanya konsentrasi geografis.
4. Kemampuan mendorong pertumbuhan daerah di belakangnya.

Pertumbuhan ekonomi lokal didefinisikan bahwa pembangunan ekonomi difokuskan pada menumbuhkan daya saing atau kemampuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah. Secara istilah, terminologi lokal atau daerah ekonomi digunakan untuk menggambarkan area geografis atau wilayah kekuasaan pemerintah yang memiliki basis ekonomi yang berdekatan. Pembangunan ekonomi lokal menggambarkan proses dimana pemerintah daerah mampu mengorganisir aktifitas bisnis.

Pembangunan ekonomi lokal dilakukan bertujuan untuk memperbaiki masyarakat dengan menggunakan sumber daya dan menciptakan kesempatan kerja penuh. Pemerintah lokal yang disebut pemerintahan propinsi dan kota/kabupaten harus mampu melakukan pendayagunaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan sumberdaya kelembagaan. Pengertian tersebut dapat diperspektifkan dalam konteks Kota Semarang, yaitu bagaimana meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi dengan cara mendayagunakan sumberdaya lokal yang bersumber dari masyarakat setempat.

Pembangunan ekonomi lokal dilakukan oleh para *stakeholder* (pemerintah, swasta dan masyarakat) dengan menitikberatkan pada peningkatan daya saing, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan penciptaan lapangan kerja dirancang dan dilaksanakan melalui peran aktif atau insiatif dari para *stakeholder*.

## 2.2. Pendekatan Investasi

Sumantoro (1983) mendefinisikan tujuan investasi ditinjau atas dasar kepentingan investor dan kepentingan pemerintah. Tujuan investasi dari kepentingan investor berorientasi ekonomis yaitu; kesempatan berusaha untuk memperoleh keuntungan, menanamkan modal dengan harapan memperoleh nilai tambah yang lebih besar dari modal yang ditanamkan, berusaha menjaga sekaligus menghindar dari kerugian yang disebabkan oleh merosotnya nilai uang. Sedangkan tujuan investasi dilihat dari kepentingan pemerintah melibatkan kepentingan masyarakat luas, baik individu maupun pihak swasta nasional maupun swasta asing. Investasi diarahkan untuk pembiayaan kegiatan pembangunan secara makro terkait dengan *public utility*.

Sejak diberlakukan otonomi daerah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf m dan Pasal 14 ayat (1) huruf m UU Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten / Kota mempunyai kewenangan untuk mengatur kegiatan investasi di daerahnya. Paska Otonomi Daerah kemandirian daerah tetap berada dalam kerangka negara kesatuan, sehingga tidak dapat diartikan adanya kebebasan penuh secara absolut dari suatu daerah untuk menjalankan hak dan fungsi otonomi menurut kehendak daerah tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional.

Keputusan Presiden RI No. 97 Tahun 1993, kemudian telah diubah dengan Keputusan Presiden RI No. 115 Tahun 1998 dan selanjutnya mengalami perubahan dengan Keputusan

Presiden RI No. 117 Tahun 1999, merupakan perubahan ke dua atas Keputusan Presiden RI No. 97 Tahun 1993 tentang tata cara penanaman modal. Investasi diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan sektor riil, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Sejalan dengan otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai hak untuk mengeksplorasi potensi sumber pendapatan daerah, agar daerah tersebut berkembang dan terealisasi menghasilkan pendapatan daerah.

Model pertumbuhan yang didorong oleh peningkatan investasi terkait dengan pengertian *multiplier* dan pengertian *accelerator*. Multiplier dalam kaitan dengan fungsi investasi adalah tambahan investasi menghasilkan tambahan yang lebih besar secara berganda pada hasil produksi dan pendapatan. Asas akselerasi secara pokok didasarkan pada stok modal (dan tambahan investasi) yang dikehendaki oleh para pengusaha tergantung dari tingkat permintaan terhadap hasil produksinya. Tingkat permintaan agregatif itu ditentukan oleh tingkat pendapatan nasional. Dengan begitu investasi neto (tambahan pada stok modal) bersangkut paut dengan kenaikan tingkat pendapatan nasional.

Salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi adalah iklim investasi yang baik dan memiliki produktivitas tinggi. Investasi yang memiliki produktivitas tinggi, berarti menambah kapasitas produksi dan sekaligus menambah output, sehingga mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Otonomi daerah dimulai sejak tahun 2001, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD). Hal demikian bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi yang kondusif di daerah.

### **3. Metode Penelitian**

#### **3.1. Sumber dan Metode Pengumpulan Data**

Penelitian dilakukan menggunakan data sekunder dan primer. Data sekunder diperoleh dengan menelusuri data tentang potensi ekonomi, infrastruktur, tata ruang, kelembagaan, ikon-ikon kota di kota Semarang. Sedangkan data primer diperoleh dari survei lapangan dengan melakukan wawancara pada beberapa *stakeholder*.

#### **3.2. Metode Analisis**

Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi diskriptif tentang potensi fisik, sosial, ekonomi, dan budaya serta keamanan dalam kaitan potensi investasi di Kota Semarang.

- a. Identifikasi potensi investasi.
- b. Kofirmasi dan kompilasi data yang diperoleh dari *In-depth Interview* kepada *stake holder*.

### **4. Pembahasan Hasil Penelitian**

#### **4.1. Potensi Geografi**

Kota Semarang memiliki posisi *geostrategic* yang sangat baik, yaitu berada pada jalur lalu lintas ekonomi pulau Jawa. Kota Semarang merupakan koridor pembangunan Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yaitu:

1. Koridor utara menghubungkan atau sebagai pintu masuk dari utara, timur dan barat melalui jalur laut.
2. Koridor selatan menghubungkan kota-kota dinamis yaitu Yogyakarta dan Surakarta yang dikenal sebagai koridor Merapi-Merbabu.
3. Koridor timur menghubungkan kota Surabaya dan sekitarnya.
4. Koridor Barat menghubungkan kota Jakarta dan sekitarnya.

Kota Semarang berkembang memfokuskan pada sektor perdagangan dan jasa. Kawasan perdagangan dan jasa di Kota Semarang tersebar di sepanjang jalan-jalan utama. Kawasan perdagangan modern terdapat di Kawasan Simpanglima yang merupakan urat nadi perekonomian Kota Semarang. Di kawasan tersebut terdapat setidaknya tiga pusat perbelanjaan, yaitu Matahari, Living Plaza dan Mall Ciputra, serta PKL-PKL yang berada di sepanjang trotoar.

Kawasan perdagangan dan jasa juga terdapat di sepanjang Jl. Pandanaran yang terkenal sebagai pusat oleh-oleh khas Semarang. Juga, di sepanjang Jl. Gajahmada, Jl. Pemuda dijumpai adanya DP mall, Paragon City dan Sri Ratu serta kawasan perkantoran. Disamping itu terdapat di sepanjang Jl. MT Haryono antara lain Java Supermall, dan pertokoan. Kawasan jasa dan perkantoran terdapat di sepanjang Jl. Pahlawan yaitu kantor-kantor pemerintah dan perbankan. Kawasan pasar-pasar tradisional seperti Pasar Johar di kawasan Kota Lama juga semakin

menambah aktivitas perdagangan di Kota Semarang terdapat di Jl. Agus Salim, Jl. Soegiyopranoto dan Jl. MT Haryono, dimana disebut sebagai segi tiga emas Kota Semarang.

#### 4.2. Potensi Topografi

Topografi Kota Semarang terdiri dari perbukitan, dataran rendah dan pantai. Topografi Kota Semarang berbentuk kemiringan. 65,22% wilayah kota Semarang berupa pantai dengan kemiringan 25%, dan 37,78 %, merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan 15-40%. Kondisi lereng tanah Kota Semarang dibagi menjadi 4 jenis kelerengan yaitu Lereng I (0-2%) meliputi Kecamatan Genuk, Pedurungan, Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara dan Tugu, serta sebagian wilayah Kecamatan Tembalang, Banyumanik dan Mijen. Lereng II (2-5%) meliputi Kecamatan Semarang Barat, Semarang Selatan, Candisari, Gajahmungkur, Gunungpati dan Ngaliyan. Lereng III (15-40%) meliputi wilayah di sekitar Kaligarang dan Kali Kreo (Kecamatan Gunungpati), sebagian wilayah kecamatan Mijen (daerah Wonoplumbon) dan sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik, serta Kecamatan Candisari. Sedangkan lereng IV (> 50%) meliputi sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik (sebelah tenggara), dan sebagian wilayah Kecamatan Gunungpati, terutama disekitar Kali Garang dan Kali Kripik. Wilayah Kota Semarang berada pada ketinggian antara 0 sampai dengan 348,00 meter di atas permukaan air laut (dpl).

Pada daerah perbukitan mempunyai ketinggian 90,56 - 348 meter dpl yang diwakili oleh titik tinggi yang berlokasi di Jatingaleh, Gombel, Tugu, Mijen, dan Gunungpati. Letak wilayah dataran tinggi berada di bagian selatan dengan kemiringan bervariasi antara 5%-40%. Sedangkan di dataran rendah mempunyai ketinggian 0,75 meter dpl, berupa pantai dan dataran rendah yang memiliki kemiringan antara 0% sampai 5%.

Topografi kota Semarang yang terdiri dari daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan, memiliki berbagai variasi potensi investasi. Kota Semarang bagian atas berpotensi untuk investasi sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan pariwisata. Sedangkan bagian bawah berpotensi untuk investasi sektor perdagangan, jasa, industri pengolahan, kelautan dan perikanan.

#### 4.3. Potensi Industri dan Usaha Unggulan

Industri besar dan sedang di Kota Semarang berpotensi dikembangkan dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan manusia. Industri besar dan sedang ini sudah memiliki eksistensi di Kota Semarang. Oleh karena itu tinggal melakukan pengembangan secara intensif. Hal tersebut dapat diperhatikan pada tabel 1

Kota Semarang juga dapat dikatakan etalase daerah kepada dunia yang menginformasikan berbagai produk unggulan daerah (PUD) dari industri/usaha kecil dan menengah yang telah terseleksi mencakup 8 (delapan) komoditas/produk sebagaimana tercantum dalam Keputusan Walikota Semarang Nomor 510/104 tanggal 12 Mei 2004 tentang Penetapan Produk Unggulan Daerah Kota Semarang sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2 berikut:

**Tabel 1**  
**Banyaknya Industri Besar dan Sedang**  
**di Kota Semarang Tahun 2013**

No	Kecamatan	Strata Industri		Total
		Industri Sedang (20-99)	Industri Besar (>99)	
1	Mijen	1	4	5
2	Gunung pati	6	1	7
3	Banyumanik	9	6	15
4	Gajahmungkur	1	0	1
5	Semarang Selatan	8	2	10
6	Candisari	2	1	3
7	Tembalang	3	0	3
8	Pedurungan	16	9	25
9	Genuk	91	35	126
10	Gayamsari	8	3	11
11	Semarang Timur	13	1	14

No	Kecamatan	Strata Industri		Total
		Industri Sedang (20-99)	Industri Besar (>99)	
12	Semarang Utara	17	14	31
13	Semarang Tengah	12	6	18
14	Semarang Barat	19	12	31
15	Tugu	10	30	40
16	Ngaliyan	32	33	65
Jumlah		235	142	377

Sumber : BPS Semarang Dalam Angka 2014

**Tabel 2**  
**Jenis Usaha Unggulan di Kota Semarang Tahun 2013**

No	Jenis Usaha	Jumlah
1	Budidaya Tanaman Anggrek / Tanaman Hias	44
2	Jamu	67
3	Sapi Perah / Daging	561
4	Pakain Jadi	21
5	Furniture / Kerajinan Meubel	63
6	Ikan Hias	90
7	Bandeng Presto / Olahan	85
8	Ikan Panggang / Ikan Asap	137

Sumber: BPS Kota Semarang, Data Diolah 2014

Dinas Kelautan dan Perikanan, Data Diolah 2014

#### 4.4. Potensi Prasyarat Investasi

##### 4.4.1. Sarana / Infrastruktur Transportasi

Jalur transportasi utama Semarang - Yogyakarta - Solo dan Pantura (Jakarta - Surabaya) sangat membantu kemudahan pergerakan masyarakat. Sementara itu, jalan yang menghubungkan antara jalur utama dengan pusat-pusat permukiman kondisinya cukup baik. Panjang jalan di seluruh wilayah Kota Semarang mencapai 2.786,056 km, 52,46% sudah diaspal 54,72% dalam keadaan baik; 32,52% dalam keadaan sedang; dan sisanya dalam keadaan rusak.

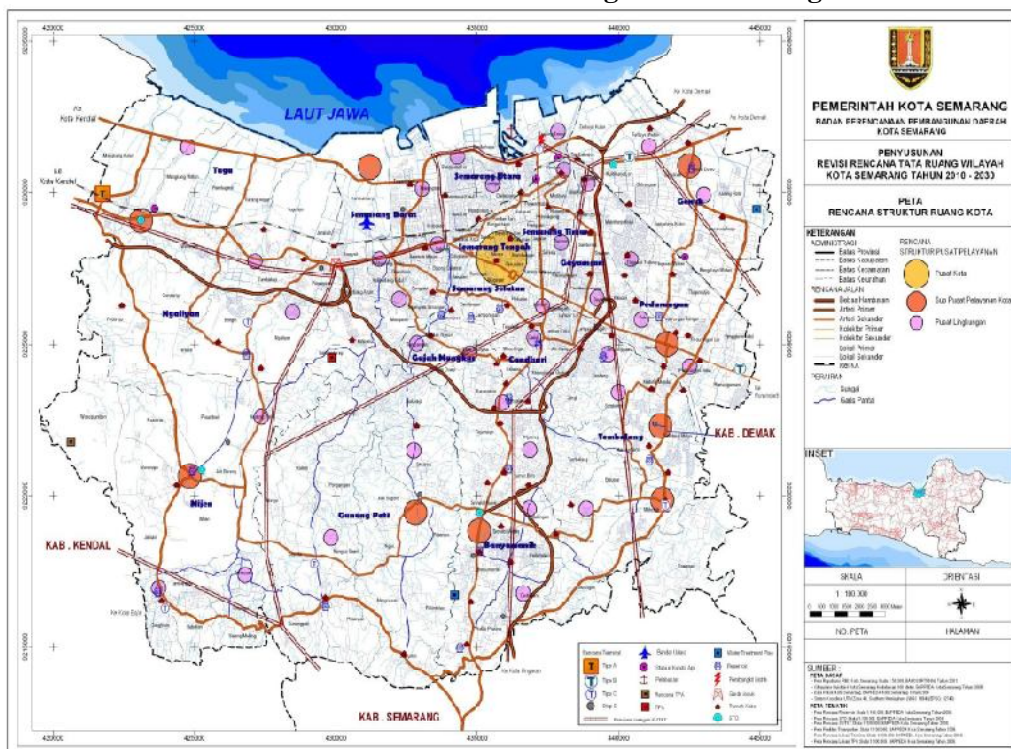
Untuk memenuhi transportasi darat terdapat Bus Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) dan Bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP). Angkutan Kereta Api di Kota Semarang dilayani 3 stasiun yaitu Stasiun Tawang, Stasiun Poncol dan Stasiun Alastuwa. Kemudian pelayanan transportasi internasional menggunakan pesawat terbang dan kapal laut yang sudah eksis keberadaannya yaitu dilayani oleh bandara Internasional Ahmad Yani dan Pelabuhan Internasional Tanjungmas.

##### 4.4.2. Penataan Ruang dan Perencanaan Pembangunan

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015, adalah mewujudkan Kota Semarang sebagai pusat perdagangan dan jasa berskala internasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Sedangkan kebijakan dan strategi penataan ruang Kota Semarang secara umum terbagi atas: Kebijakan pengembangan struktur ruang dan Kebijakan pengembangan pola ruang. Kebijakan pengembangan struktur ruang Kota Semarang, ditunjukkan pada gambar 1 berikut berdasarkan pada:

- Pemantapan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa berskala internasional.
- Peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan.
- Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana sarana umum.

**Gambar 1. Rencana Tata Ruang Kota Semarang**



**4.5. Potensi Kawasan Industri**

**4.5.1. Kawasan Industri Guna Mekar Indonesia (GMI)**

- a. Jumlah Perusahaan : 48 unit
- b. Luas Area : 130 Ha
- c. Lokasi Kel./Kec. : Kel. Tambakaji dan Kec. Ngaliyan
- d. Fasilitas: Tanah siap bangun, bangunan siap pakai, jalan lingkungan, Listrik / telpon / air
- e. Kemudahan / keuntungan lain: bebas banjir dan bebas kemacetan kota.
- f. Alamat Pembangun / Pengelola : Jl. Tambakaji II No. 7 Semarang

**4.5.2. Kawasan Industri Terboyo**

- a. Jumlah Perusahaan : 67 unit
- b. Luas Area : 300 Ha
- c. Lokasi Kel./Kec. : Kel. Terboyo Wetan dan Kec. Genuk
- d. Fasilitas: jalan lingkungan 12 s/d 20 m, jaringan air bersih, telpon lokal dan internasional, listrik 3 phase, bebas kewajiban Ijin Undang-Undang Gangguan (HO), sertifikat HGB 30 tahun dan dapat diperpanjang 2 x 20 tahun, satuan pemadam kebakaran dan jaringan pipa hidrant, dan sistem keamanan dan kebersihan lingkungan terpadu
- e. Alamat Pembangun / Pengelola : Jl. Kaligawe Km. 6 Semarang, Jl. Pandanaran No. 6 Kav. 14 Semarang, Telpon / Fax : 6580110, 8415212, 6580623

**4.5.3. Kawasan Industri Bukit Semarang Baru (BSB)**

- a. Jumlah Perusahaan : 3 unit
- b. Luas Area : 50 Ha, sudah dibangun 30 Ha
- c. Lokasi Kel./Kec. : Kel. Mijen dan Kec. Mijen
- d. Fasilitas: tanah siap bangun, bangunan siap pakai, jalan lingkungan, dan listrik / telpon / air
- e. Alamat Pembangun / Pengelola: Jl. Pandanaran No. 6 Kav. 15 Semarang, telpon / Fax 8443005

**4.5.4. Kawasan Industri Sinar Centra Cipta**

- a. Jumlah Perusahaan: 12 unit
- b. Luas Area : 95 Ha
- c. Lokasi : Komplek Lingkar Tanjung Mas Kec. Semarang Utara
- d. Fasilitas, tanah siap bangun, pinggir jalan arteri utara, dekat pelabuhan Tanjung Emas ( jarak kurang lebih 0,7 Km ), dekat Bandar Udara ( jarak kurang lebih 2,5 Km )

e. Alamat Pembangun / Pengelola : Jl. Marina No. 3 Semarang, Telp / Fax 7693456

#### **4.5.5. Kawasan Industri Candi**

- a. Jumlah Perusahaan : 26 unit
- b. Luas Area : 300 Ha, terbangun 240 Ha
- c. Lokasi Kel./Kec. : Jl. Gatot Subroto Kel. Ngaliyan Kec. Ngaliyan
- d. Fasilitas: tanah siap bangun, jalan 20 s/d 30 m, green belt, listrik, telpon, air PAM / bawah tanah, dan security service, bebas banjir dan ideal untuk industri menengah dan besar.
- f. Alamat : Jl. Puri Anjasmoro Blok F-I No. 8 Semarang Telp : 7602345, 7607651

### **5. Kesimpulan dan Saran**

#### **5.1. Kesimpulan**

- a. Kota Semarang memiliki potensi berbagai jenis investasi, di pusat kota potensi investasi terutama sektor perdagangan dan jasa.
- b. Di bagian atas Kota Semarang cocok untuk pengembangan investasi sektor peternakan, perkebunan, pertanian dan pariwisata.
- c. Di bagian bawah Kota Semarang cocok untuk pengembangan investasi sektor kelautan, perikanan laut, dan kawasan industri pengolahan atau manufaktur.

#### **5.2. Saran**

- a. Pemerintah perlu memiliki konsistensi kebijakan tentang tata ruang untuk pengembangan investasi antara sektor perdagangan dan jasa, industri manufaktur.
- b. Pemerintah perlu memiliki political will dalam merangsang pertumbuhan investasi dengan membangun sistem informasi investasi, sehingga menggairahkan para investor untuk melakukan ekspansi investasi di Kota Semarang.
- c. Pemerintah perlu membangun sistem birokrasi yang efisien, sehingga terdapat sinkronisasi tujuan pembangunan dan gairah investasi yang secara simultan pada tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bhenyamin Hoessein, 2000, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan Sebagai Tanggapan Terhadap Aspirasi Kemajemukan Masyarakat dan Tantangan Globalisasi*, Usahawan, No 04, April
- Berry, B.J.L, 1969, *Growth Centers and Their Potentials in Great Upper Lakes Region*. Washington D.C. Upper Great Lakes Commission.
- BPS Kota Semarang, 2013, *Semarang Dalam Angka*, Semarang.
- Budiharsono, S., 2001, *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*. Pradnya Paramita: Jakarta
- Cameron, G., 1970, *Growth Areas, growth centers, and regional conversion*, Scottish Journal of Political Economy 17,19-38.
- Djanahar, Irwan, 2001, Pengantar Kuliah Manajemen Strategi - Analisa dan Pemilihan Strategies. Magister Manajemen Program Pasca Sarjana USU, Medan 2001.
- Friedmann, J., 1966, *Regional Development Policy : A Case Study of Venezeula*. Cambridge, Mass.: The MIT Press.
- Hadi Setia Tunggal, 1999, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta:Harvarindo.
- Hansen, N.M., 1970, *Growth Centers in Regional Economic Development*. New York: The Free Press.
- Hirschman. A.O., 1958, *The Strategy of Economic Development*. New Haven: Yale University Press.
- Pemerintah Kota Semarang, 2010, *Kajian Isu-Isu Strategis Percepatan Investasi di Kota semarang*, Badan pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang.
- Kasarda, John D. 1999. *Time-Based Competition & Industrial Location in the Fast Century*. Real Estate Issues, Winter 1998/1999.
- Kuncoro, M, 2000. *Ekonomi Pembangunan*. YKPN: Yogyakarta
- Kuncoro, M, et al, 2003, *Indonesia's Clove Cigarette Industri : Scp and Cluster Analysis*, 5<sup>th</sup>.IRSA Conference.
- Kuznets, 1969, *Modern Economic Growth*, New Haven, Yale University Press.

- Moriarty, Barry M. 1980. *Industrial Location and Community Development*. Chapel Hill, UNC: The University of North Carolina Press.
- Pemerintah Kota Semarang, 2010, *Penyusunan Masterplan Pengembangan Potensi Unggulan Kota Semarang Tahun 2010 – 2035*, Badan pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang.
- Pemerintah Kota Semarang, 2009, *Penyusunan Cetak Biru (Masterplan) Pengembangan Penanaman Modal Kota Semarang*, Badan pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang.
- Porter, Michael E., 1994, Keunggulan Bersaing, Menciptakan dan Mempertahankan Kinerja Unggul. *Harvard Business Review*
- Produk Domestik Regional Bruto Kota Semarang 2009. *Kerjasama Bappeda dan BPS Kota Semarang*.
- Rangkuti, Freddy, 2004, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, Cetakan Kedua*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka, Jakarta
- Ray, 2003, *Survei: Persepsi Pelaku Usaha Tentang Otonomi Daerah dan Dampaknya Terhadap Iklim Usaha di Daerah*. REDI: Surabaya
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), 2010, *Kota Semarang Tahun 2010-2015*. Bappeda Kota Semarang
- Regional Economic Development Institute (REDI), *Survei Persepsi Perilaku Usaha Tentang Otonomi Daerah dan Dampaknya Terhadap Iklim Usaha di Daerah (Studi di 23 Kabupaten/Kota di Indonesia)*.
- Rodwin, L. 1963. *Choosing regions for development dalam Friedman dan Alonso*. (eds) 1975.
- Rostow W.W. 1971. *The Stages Of Economic Growth*. New York:Cambridge University Press.
- Robert A. Simanjuntak. 2000. *Implikasi Fiskal Pelaksanaan Otonomi Daerah* . Usahawan, No.4, April.
- Sjafrizal, 1997. *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat*. Prisma LP3ES, No. 3 Th. XXVI: 27-38.
- Sumantoro. 1983. *Peranan Perusahaan Multinasional Dalam Pembangunan Negara Sedang Berkembang Dan Implikasinya Di Indonesia*. Alumni Bandung.
- Samuelson, Paul A. dan Nordhaus, William D., 2005. *Economics*, Eighteenth Ed., McGraw-Hill. (International Edition).
- Sudarsono, Juwono. 1999 *Pembangunan Politik dan Pembaharuan Politik*. Jakarta.
- Tarigan, R. 2004. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. PT.Bumi Aksara, Jakarta.
- Todaro, M. P. 1995. *Economic Development in the Third World, 3rd edition*. Longmen Inc.: New York.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 1999 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 1998 jo Nomor 177 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanaman Modal.
- Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), 2002 dan 2003, *Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia*, Jakarta: KPPOD
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Propinsi Jateng 2001-2005.
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang.
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang.
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang tahun 2005 – 2025.
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang tahun 2010 – 2015.



Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 050 / 2020 / SJ Tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah

Surat Edaran Bersama Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri nomor 0259/M.PPN/1/2005 dan 050/166/SJ Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia No 3274).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.